AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat
p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984
Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.
https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i3.7773

IMPLEMENTASI FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP GENERASI Z BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2011: STUDI PADA DPC PARTAI GERINDRA KOTA PADANG

Implementation of the Political Education Function of Political Parties Toward Generation Z Based on Law No. 2 of 2011: A Study on the Branch Leadership Council (DPC) of the Gerindra Party in Padang City

Silvira & Adil Mubarak
Universitas Negeri Padang
silvira.cantika@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 21, 2025	Oct 13, 2025	Oct 25, 2025	Oct 30, 2025

Abstract

This study is motivated by the low political participation of Generation Z in the lead-up to the 2024 regional elections (*Pilkada*), despite political education being one of the core functions of political parties aimed at fostering public engagement in democratic processes. The research seeks to explore the effectiveness of political education programs—such as outreach activities and workshops—in raising political awareness and addressing challenges such as distrust in political institutions and limited access to digital information. A qualitative descriptive method was employed, utilizing interviews, observation, and documentation. Informants included members of the Padang City Branch Leadership Council (DPC) of the Gerindra Party, representatives from the National and Political Unity Agency (Kesbangpol), and individuals from Generation Z who were the target of political education efforts. The findings indicate that political

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

education initiatives by the Gerindra Party remain limited and have not yet yielded optimal results. Over the past year, activities have included only two main agendas: internal cadre meetings and social events such as Independence Day celebrations and screenings of the film *G30S/PKI*. These activities primarily focused on internal development and lacked strategic outreach to the broader public, particularly Generation Z, who represent a key segment of first-time voters. These findings underscore the need for innovative and expanded political education strategies that are more inclusive, structured, and adaptive to the characteristics of the digital generation, in order to enhance youth political participation in regional elections.

Keywords: Political Education; Political Party Function; Generation Z; Voter Participation; *Pilkada* 2024

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik Generasi Z dalam menghadapi Pilkada 2024, meskipun pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi program pendidikan politik, seperti kegiatan penjangkauan dan lokakarya, dalam membangun kesadaran politik serta mengatasi tantangan seperti ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan keterbatasan akses informasi digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengurus DPC Partai Gerindra Kota Padang, perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta individu dari kalangan Generasi Z yang menjadi sasaran pendidikan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Gerindra masih bersifat terbatas dan belum mencapai hasil optimal. Dalam satu tahun terakhir, kegiatan yang dilakukan hanya meliputi dua agenda utama: rapat kader internal serta kegiatan sosial seperti perayaan Hari Kemerdekaan dan pemutaran film G30S/PKI. Aktivitas tersebut lebih berfokus pada pembinaan internal dan belum secara strategis menyasar masyarakat luas, terutama Generasi Z sebagai segmen pemilih pemula yang potensial. Temuan ini menyoroti perlunya inovasi dan perluasan strategi pendidikan politik yang lebih inklusif, terstruktur, dan adaptif terhadap karakteristik generasi digital, guna meningkatkan partisipasi politik kaum muda dalam pemilihan daerah.

Kata Kunci: Pendidikan Politik; Fungsi Partai Politik; Generasi Z; Partisipasi Pemilih; Pilkada 2024

PENDAHULUAN

Dalam konteks demokrasi modern di Indonesia, keberadaan partai politik memiliki peran yang semakin signifikan sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan politik, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi Generasi Z (Gen Z) yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Dalam (Surbakti, 2018) mendefinisikan partai politik sebagai kelompok individu yang terorganisasi secara stabil, memiliki kesatuan tujuan berdasarkan ideologi tertentu, serta berupaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Sementara itu, (Kurniawan & Handayani, 2022) menegaskan bahwa salah satu fungsi pokok partai politik adalah menjalankan sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat terhadap berbagai dinamika politik yang terjadi di suatu negara. Proses ini diwujudkan melalui kegiatan pendidikan politik yang bertujuan menanamkan serta merumuskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agar tercermin dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Sahya, 2023) menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut bersifat abstrak dan relatif, sehingga perlu ditanamkan secara kontekstual melalui pendidikan politik yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik memiliki sejumlah fungsi pokok, antara lain: 1) memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang memahami hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2) menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya kesejahteraan rakyat; 3) menampung, menghimpun, serta menyalurkan aspirasi politik masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan negara; 4) mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat; dan 5) melaksanakan rekrutmen politik secara demokratis dalam pengisian jabatan publik dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Selain itu, Pasal 13 huruf (e) menegaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menumbuhkan kesadaran politik, meningkatkan partisipasi publik, serta membentuk kemandirian dan kedewasaan warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan fungsi mendasar yang harus dilaksanakan oleh setiap partai politik di Indonesia. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya persoalan yang cukup serius, yaitu rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan politik seperti pemilihan umum. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya upaya pendidikan politik yang relevan dengan karakteristik generasi muda di era digital. Menurut Putra dalam (Zis et al., 2021), Generasi Z adalah kelompok individu yang lahir setelah tahun 1995. Sementara itu, pandangan lain menyebutkan bahwa Generasi Z, atau yang dikenal juga sebagai *generation*, mencakup mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini merupakan kelompok pemilih muda yang memiliki posisi penting dan strategis dalam dinamika politik masa kini dan masa depan.

Gen Z dikenal sebagai generasi yang kritis, terbuka terhadap teknologi, serta aktif dalam penggunaan media sosial. Namun demikian, tingkat keterlibatan mereka dalam politik masih tergolong rendah dan cenderung menunjukkan sikap apatis terhadap isu-isu politik (Mujtahid et al., 2025). Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang tahun 2024 dapat dilihat dari berikut:

Tabel 1. Data partisipasi pilgub

Tahun	Partisipasi
2005	53,30%
2010	54,25%
2015	52,34%
2020	52,12%
2024	49,18%

Sumber:KPU Kota Padang, 2025

Tabel 2. Data partisipasi pilwako

Tahun	Partisipasi
2008	57,40%
2013 (Putaran 1)	57,66%
2013 (Putaran 2)	53,58%
2018	63,76%
2024	49,06%

Sumber:KPU Kota Padang, 2025

dari tabel 1 dan 2 diatas, menunjukkan bahwa partisipasi pemilih hanya mencapai 49,6% dari total 665.126 Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana kontribusi Gen Z sebesar 16,26% masih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah.

Menurut Carl J. Friedrich dalam (Miriam, 2024) mendukung hal tersebut dengan menjelaskan bahwa partai politik harus berfungsi sebagai organisasi yang memberikan manfaat ideal, termasuk pendidikan politik, untuk meningkatkan kesadaran warga negara; sedangkan Undang-Undang No. 2/2011 Pasal 11 mengamanatkan fungsi ini sebagai sarana pendidikan, namun implementasinya di lapangan, seperti di Partai Gerindra, masih terbatas pada internal kader dan belum optimal menjangkau masyarakat luas. Menurut artikel dari rri.co.id (2025) dan IDN Times (2025), Gen Z cenderung skeptis terhadap partai politik

karena masalah korupsi dan ketidakpercayaan, yang diperburuk oleh penurunan partisipasi dalam pemilihan walikota Kota Padang dari 63,76% pada tahun 2018 menjadi 49,06% pada tahun 2024, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dalam pendidikan politik. Permasalahan penelitian ini bermula dari belum efektifnya pelaksanaan pendidikan politik Partai Gerindra di Kota Padang yang belum optimal menjangkau Gen Z, serta faktor-faktor penyebab rendahnya minat dan partisipasi mereka.

Fokus permasalahan terletak pada bagaimana pendidikan politik yang seharusnya masif dan inklusif justru terbatas, seperti kegiatan yang hanya menyasar kader internal, belum menyasar masyarakat umum, dan pengaruh eksternal seperti skeptisisme terhadap partai politik dan kegiatan sehari-hari. Hal ini didukung oleh Syahrial dalam Diryo Suparto (2021 : 32) yang menggambarkan partisipasi sebagai aktivitas individu dalam memengaruhi proses politik, namun realitas menunjukkan bahwa Gen Z seringkali merasa terputus dari dunia politik, sebagaimana terungkap dalam Dalam fh.unis.ac.id (2025) yang mencatat bahwa mereka merupakan 60% pemilih pada Pemilu 2024 namun tetap apatis. Dalam hal ini dapat digarisbawahi adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan implementasinya, di mana kurangnya pendekatan digital menjadi kendala utama (Media, 2024). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Partai Gerindra dalam melaksanakan pendidikan politik bagi Gen Z di Kota Padang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat minat dan partisipasi mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan politik yang mana nantinya juga akan berdampak pada partisipatif Gen Z dalam demokrasi lokal. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana program pendidikan politik, seperti penjangkauan dan lokakarya, dapat diimplementasikan secara efektif untuk membangun kesadaran politik, sekaligus mengatasi tantangan seperti ketidakpercayaan dan kurangnya akses terhadap informasi digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Partai Gerindra Kota Padang mengimplementasikan fungsi pendidikan politik terhadap Generasi Z sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial dan politik dalam konteks yang alami dan dinamis, tanpa intervensi berlebihan dari peneliti. Menurut (Abdussamad,

2021), penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang berlandaskan paradigma naturalistik dan berfokus pada teori fenomenologi. Artinya, penelitian ini berupaya memahami makna dan interpretasi dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu. Maka dari itu, pendekatan kualitatif deskriptif sangat sesuai untuk menelusuri sejauh mana partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik, terutama dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik Generasi Z sebagai pemilih muda.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengurus DPC Partai Gerindra Kota Padang, perwakilan dari Kesbangpol Kota Padang, serta Generasi Z yang menjadi sasaran pendidikan politik. Pemilihan informan Generasi Z dilakukan dengan teknik snowball sampling, yaitu memilih informan awal yang kemudian merekomendasikan informan lain yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh representasi pandangan yang lebih luas dan mendalam. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan partai politik yang berkaitan dengan pendidikan politik, seperti pelatihan kader muda, sosialisasi politik, dan kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internal partai, dan liputan media untuk memperkuat temuan lapangan. Analisis data menggunakan model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan secara sistematis. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas pendidikan politik partai terhadap Generasi Z.

HASIL

Pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan masih terbatas dan belum berjalan optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada anggota maupun masyarakat luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus DPC Gerindra, menyatakan bahwa,

"Kegiatan pendidikan politik di DPC Gerindra tahun ini memang belum banyak, baru dua kali kita adakan, satu di internal partai dan satu lagi kegiatan nobar G30S/PKI yang sifatnya lebih kebangsaan."

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan masih bersifat simbolis dan tidak berkesinambungan. Program yang dilaksanakan belum mengarah pada upaya strategis untuk membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya Generasi Z. Keterbatasan waktu, sumber daya, dan prioritas kegiatan internal menjadi faktor utama mengapa fungsi pendidikan politik belum terlaksana secara optimal di tingkat DPC.

Secara umum, pelaksanaan pendidikan politik lebih banyak difokuskan pada kalangan internal partai, terutama bagi pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) di berbagai kecamatan, sebagaimana contoh gambar berikut:



Gambar 1. Pendidikan Politik Internal (PAC)

Dalam gambar 1 ini dijelaskan bahwa kegiatan ini biasanya berupa pembekalan dan rapat koordinasi yang bertujuan memperkuat pemahaman ideologi, garis perjuangan partai, serta nilai-nilai nasionalisme yang menjadi landasan perjuangan Gerindra. Salah satu pengurus PAC, menyampaikan bahwa,

"Kami sering mengikuti rapat koordinasi dan pembekalan dari DPC, isinya tentang sejarah partai, ideologi perjuangan, dan arahan dari pimpinan daerah."

Kegiatan seperti ini memang efektif dalam membangun kesolidan antarstruktur internal, namun belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas atau generasi muda non-kader. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan masih berorientasi pada

penguatan organisasi internal, belum pada pembentukan kesadaran politik publik secara luas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan internal, DPC Gerindra Kota Padang juga mengadakan kegiatan eksternal yang bersifat sosialisasi kebangsaan, seperti menonton bersama film G30S/PKI yang melibatkan masyarakat sekitar dan beberapa kader muda partai.



Gambar 2. Kegiatan menonton bersama G30S/PKI bersama masyarakat

Dimana pada gambar 2 ini, kegiatan dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan kesadaran sejarah di kalangan generasi muda. Seorang kader muda, menyampaikan bahwa,

"Kegiatan nobar G30S/PKI itu seru, karena kami jadi tahu sejarah bangsa, tapi menurut saya perlu juga ada kegiatan lain yang lebih interaktif seperti diskusi atau seminar politik."

Meskipun kegiatan ini memberikan nilai edukatif secara tidak langsung, pelaksanaannya masih bersifat sporadis dan belum dikemas dalam bentuk program berkelanjutan. Dengan demikian, upaya partai dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi partai melalui media non-formal seperti film perlu dikembangkan dengan metode yang lebih variatif dan menarik bagi generasi muda.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, diketahui pula bahwa struktur organisasi DPC Gerindra Kota Padang belum memiliki bidang atau tim khusus yang secara sistematis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan politik. Aktivitas pendidikan politik dilaksanakan secara kolektif oleh para pengurus sesuai agenda yang disepakati bersama, tanpa adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas. Menurut pengurus DPC lainnya, di DPC belum ada bidang khusus yang menangani pendidikan politik, jadi biasanya kegiatan dilakukan bersama sesuai hasil rapat pengurus. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pendidikan politik cenderung tidak terarah dan bergantung pada inisiatif

pengurus. Akibatnya, pelaksanaan fungsi pendidikan politik belum menjadi kegiatan rutin yang terencana, melainkan hanya sebatas kegiatan insidental yang muncul ketika ada momentum tertentu seperti peringatan hari nasional atau kegiatan organisasi.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang), yang menyampaikan bahwa,

"Sebagian besar partai politik di Kota Padang, termasuk Gerindra, masih fokus pada kegiatan internal partai. Pendidikan politik untuk masyarakat luas, apalagi generasi muda, masih minim sekali."

Kesbangpol menilai bahwa partai politik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat politik untuk perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi agen pendidikan politik yang mendorong kesadaran warga negara dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol telah berupaya mendorong partai-partai untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik, misalnya melalui seminar politik, pelatihan kepemimpinan, atau kampanye digital yang melibatkan generasi muda. Namun, partai-partai masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, pendanaan, dan perencanaan kegiatan yang sistematis.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan beberapa perwakilan Generasi Z di Kota Padang, ditemukan bahwa tingkat kesadaran politik mereka cukup tinggi, namun minat untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik masih rendah. Salah seorang informan, saudari L, menyatakan bahwa,

"Kami tahu pentingnya politik, tapi partai jarang menyapa anak muda dengan cara yang menarik. Kalau mereka bikin kegiatan di media sosial atau webinar mungkin kami tertarik ikut."

Generasi Z lebih menyukai pendekatan yang bersifat digital, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, dibandingkan dengan pendekatan konvensional seperti rapat atau ceramah politik. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kesenjangan antara pola komunikasi partai politik yang masih tradisional dengan karakter generasi muda yang lebih modern dan dinamis.

PEMBAHASAN

Partai politik memiliki tanggung jawab fundamental dalam menjalankan fungsi pendidikan politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat dan menumbuhkan partisipasi aktif warga negara. Menurut (H. Muhdi, 2014), salah satu peran utama partai politik adalah menjalankan sosialisasi politik melalui proses pendidikan politik yang membentuk sikap dan pandangan individu terhadap realitas politik di negaranya. Dalam konteks DPC Partai Gerindra Kota Padang, pelaksanaan fungsi ini masih belum optimal karena kegiatan pendidikan politik lebih banyak difokuskan pada penguatan internal kader, bukan masyarakat umum. Kegiatan seperti pembekalan kader, rapat koordinasi, dan nonton bersama film G30S/PKI memang memiliki nilai kebangsaan, tetapi belum mampu membentuk kesadaran politik yang mendalam di kalangan masyarakat. Partai seharusnya menjadi wadah pembelajaran politik bagi semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang kini menjadi tulang punggung demokrasi digital, sehingga itu, ketidaktercapaian fungsi pendidikan politik menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal partai dengan implementasi di lapangan (Diryo, 2020).

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC Gerindra Kota Padang masih bersifat seremonial dan belum menyentuh dimensi substantif pendidikan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai, kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan selama tahun 2025 hanya dilakukan dua kali, yaitu kegiatan internal kader dan acara kebangsaan. Menurut (Handoyo & Lestari, 2017), pendidikan politik seharusnya diarahkan untuk membangun kemampuan individu menjadi pribadi yang mandiri dan aktif dalam peran kewarganegaraannya. Namun, pelaksanaan pendidikan politik oleh DPC Gerindra belum mampu mewujudkan hal tersebut karena belum dirancang secara terencana dan berkelanjutan. Pendidikan politik yang bersifat insidental tidak akan cukup membentuk kesadaran politik kritis di kalangan generasi muda. Selain itu, tidak adanya bidang khusus yang menangani pendidikan politik membuat kegiatan berjalan tanpa arah strategis dan tanpa evaluasi hasil. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pembinaan politik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pendidikan politik di Gerindra Kota Padang masih didominasi oleh bentuk sosialisasi internal seperti rapat koordinasi antar pengurus dan kegiatan pembekalan ideologi partai. Menurut (H. Muhdi, 2014), sosialisasi politik

merupakan sarana bagi partai untuk memperluas wawasan politik masyarakat serta meningkatkan partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pelaksanaan sosialisasi politik di tingkat DPC Gerindra belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan tersebut karena kegiatan hanya menyasar kalangan kader. Dalam praktiknya, partai belum memanfaatkan ruang publik atau media digital sebagai sarana sosialisasi politik kepada masyarakat umum. Akibatnya, pemahaman politik di masyarakat terutama Generasi Z masih bersifat parsial dan bergantung pada informasi media sosial yang tidak selalu valid. Kegiatan pendidikan politik yang bersifat internal seharusnya diimbangi dengan kegiatan eksternal yang mampu membangun komunikasi dua arah antara partai dan masyarakat. Maka dari itu, dalam pemelitian (Indra Permana, 2016) menegaskan bahwa tanpa upaya kegiatan dua arah baik internal dan ekternal, partai akan sulit membangun citra positif dan menarik simpati generasi muda yang menjadi basis pemilih rasional.

Menurut Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik ditujukan untuk menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, DPC Partai Gerindra Kota Padang belum maksimal menjalankan amanat undang-undang karena kegiatan pendidikan politik masih terbatas pada ruang lingkup internal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik publik belum terlaksana secara efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh (Hermawan, 2020; Pasaribu, 2017), pendidikan politik yang baik harus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realitasnya, partisipasi masyarakat umum terutama generasi muda dalam kegiatan politik masih rendah karena kurangnya pendekatan edukatif dari partai. Gerindra lebih banyak berperan sebagai penggerak kegiatan seremonial daripada fasilitator pembelajaran politik yang inklusif. Maka dari itu, perlu adanya transformasi metode sosialisasi politik agar partai dapat menjalankan fungsinya sesuai harapan masyarakat demokratis.

Dalam aspek kaderisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Gerindra Kota Padang telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pembekalan dan rapat koordinasi pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC). Menurut (Wijayanti & Iswandi, 2021), proses kaderisasi politik merupakan bagian penting dari pendidikan politik yang bertujuan membentuk pribadi kader yang berintegritas, loyal, dan memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosial politiknya. Dalam pelaksanaannya, kaderisasi Gerindra Kota Padang masih bersifat top-down dan berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan partai. Kegiatan kaderisasi belum diarahkan pada peningkatan kemampuan analitis kader terhadap isu-isu

politik kontemporer. Padahal, kaderisasi idealnya mencetak kader yang tidak hanya patuh pada struktur, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, sehingga itu, pelaksanaan kaderisasi di tingkat DPC masih perlu diperluas agar dapat menciptakan generasi kader muda yang adaptif dan berpikiran terbuka terhadap dinamika politik.

Kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin memang menunjukkan adanya komitmen partai dalam memperkuat struktur internalnya. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh (Prayugo & Prayitno, 2022), pendidikan politik tidak boleh berhenti pada pembentukan kesetiaan kader saja, tetapi harus berorientasi pada pembentukan kesadaran politik yang luas. Dalam konteks ini, DPC Gerindra Kota Padang masih menempatkan kaderisasi sebagai sarana memperkuat organisasi, bukan sebagai sarana transformasi sosial-politik. Akibatnya, kegiatan kaderisasi belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, terutama kalangan muda. Banyak anggota Generasi Z yang belum memahami fungsi partai politik secara benar karena kurangnya pendekatan edukatif dari partai. Maka dari itu, pengembangan program kaderisasi harus dilakukan dengan menggabungkan pendekatan ideologis dan edukatif agar kader muda tidak hanya loyal, tetapi juga berwawasan luas dan kritis terhadap isu publik.

Aspek pembinaan masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata dari pendidikan politik yang bertujuan memperluas pengetahuan politik warga negara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Gerindra Kota Padang belum memiliki program pembinaan masyarakat yang terstruktur. Menurut (Mulia, 2024), pembinaan politik dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pelatihan, kursus, seminar, atau kegiatan sosial yang menumbuhkan kesadaran politik. Ketiadaan program pembinaan di tingkat DPC menyebabkan partai kehilangan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dalam wawancara dengan pengurus DPC, dijelaskan bahwa pembinaan politik masih dalam tahap perencanaan dan membutuhkan dukungan struktural dari partai pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pendidikan politik belum menjadi prioritas utama dalam agenda kerja partai. Padahal, pembinaan politik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai sebagai instrumen demokrasi.

Selain pembinaan, bentuk lain dari pendidikan politik yang penting adalah workshop atau pelatihan politik. Berdasarkan hasil wawancara, DPC Gerindra Kota Padang belum pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan formal bagi kader maupun masyarakat. Hal ini

bertolak belakang dengan konsep yang dikemukakan Muhdi dalam (M. Muhdi et al., 2017), bahwa pendidikan politik harus bersifat aktif dan partisipatif, bukan hanya sekadar penyampaian informasi. Workshop politik berperan penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berargumentasi kader serta masyarakat (Fitria & Puspitarini, 2023). Dengan tidak adanya kegiatan seperti ini, kemampuan kader untuk berinteraksi secara produktif dengan masyarakat menjadi terbatas. Selain itu, peluang partai untuk memperluas basis dukungan melalui pendekatan edukatif juga terhambat. Maka dari itu, pelatihan politik harus menjadi salah satu prioritas agar partai dapat menjalankan fungsi pendidikannya secara lebih profesional.

Generasi Z sebagai kelompok pemilih muda memiliki karakteristik unik yang sangat bergantung pada teknologi dan media digital. Menurut Jwell dalam (Riyanti et al., 2023), pendidikan politik modern harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan karakteristik masyarakat yang semakin digital. Namun, DPC Gerindra Kota Padang masih menggunakan metode tradisional dalam sosialisasi politik seperti pertemuan tatap muka dan rapat organisasi. Hal ini membuat kegiatan partai terasa monoton dan kurang relevan bagi generasi muda. Minimnya pemanfaatan media sosial dan platform digital menyebabkan pesan politik partai sulit menjangkau generasi muda secara efektif. Jika partai ingin menarik minat Generasi Z, maka strategi komunikasi politiknya harus beralih ke model interaktif berbasis digital seperti webinar, konten edukatif di media sosial, atau kolaborasi dengan komunitas kreatif. Dengan cara ini, partai dapat memperluas jangkauan pendidikan politik sekaligus membangun citra positif di mata generasi muda saat ini (Prasetyo et al., 2022).

Selain persoalan metode, kualitas substansi pendidikan politik juga menjadi perhatian penting. Menurut (Pasaribu, 2017), pendidikan politik yang efektif harus menanamkan nilai-nilai moral kebangsaan, memperkuat kesadaran hukum, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, kegiatan pendidikan politik DPC Gerindra Kota Padang masih bersifat normatif dan belum menyentuh isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan generasi muda, seperti politik digital, isu lingkungan, dan partisipasi pemilih pemula. Akibatnya, pendidikan politik tidak menarik minat generasi muda karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan mereka. Padahal, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan politik jika partai mampu menghadirkan materi pendidikan politik yang kontekstual (Indah Pratiwi et al., 2020). Oleh karena itu, peningkatan kualitas materi pendidikan politik harus menjadi prioritas dalam implementasi program partai di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi pendidikan politik oleh DPC Partai Gerindra Kota Padang belum berjalan maksimal karena masih bersifat formalistik, tidak berkelanjutan, dan minim inovasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Yusriati & Amrizal, 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas pendidikan politik bergantung pada konsistensi, keberlanjutan, dan inovasi metode pelaksanaannya. Dalam konteks generasi muda, partai perlu memperluas strategi pendidikan politik dengan mengintegrasikan media digital, membentuk forum kader muda, dan menyusun kurikulum politik berbasis isu kontemporer. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui pembentukan bidang pendidikan politik di tingkat DPC menjadi langkah strategis agar kegiatan lebih terarah. Dengan demikian, partai dapat berperan nyata sebagai agen pendidikan demokrasi yang mampu membangun kesadaran politik generasi muda serta memperkokoh sistem politik yang partisipatif dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi pendidikan politik oleh DPC Partai Gerindra Kota Padang belum terlaksana secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan masih bersifat internal dan seremonial, sehingga belum menyentuh masyarakat luas, khususnya Generasi Z. Pelaksanaan program pendidikan politik belum didukung oleh perencanaan yang sistematis, bidang khusus, serta evaluasi yang terukur. Kegiatan kaderisasi lebih menekankan loyalitas terhadap pimpinan partai dibandingkan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran demokratis. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi politik bagi generasi muda masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya minat dan partisipasi politik generasi muda terhadap aktivitas partai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan strategi baru dalam pelaksanaan pendidikan politik yang bersifat inklusif, kreatif, dan kontekstual dengan perkembangan zaman sehingga nantinya dapat terlaksana secara maksimal.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi fungsi pendidikan politik oleh partai politik, khususnya DPC Partai Gerindra Kota Padang, dalam membentuk kesadaran politik Generasi Z. Penelitian ini memperkaya kajian ilmu politik dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan

praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran konkret mengenai tantangan yang dihadapi partai politik dalam mengadaptasi strategi pendidikan politik di era digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi partai politik lain untuk memperbaiki mekanisme kaderisasi dan sosialisasi politik agar lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Dari sisi akademik, penelitian ini memperluas literatur mengenai peran partai dalam pendidikan politik di tingkat daerah. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan Kesbangpol dalam merancang kebijakan pembinaan partai yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan politik.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lebih banyak partai politik di Kota Padang maupun daerah lain agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi fungsi pendidikan politik. 2) menggunakan pendekatan mixed methods untuk menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga hasilnya lebih mendalam dan terukur. 3) Menyoroti peran media sosial dan teknologi digital sebagai sarana utama pendidikan politik bagi Generasi Z, mengingat generasi ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi. 4) Mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara partai politik, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dapat memperkuat literasi politik masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif dalam memberikan solusi konkret bagi peningkatan kualitas pendidikan politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Diryo, S. (2020). *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Cendekia Press.

Fitria, N. J. L., & Puspitarini, R. C. (2023). Workshop Bedah Buku "Kajian Kebijakan Politik Internasional: Metode, Teori dan Kasus" di Universitas Panca Marga. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, *7*(2), 100–111. https://doi.org/10.52250/p3m.v7i2.632

Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Poohn Cahaya.

Hermawan, I. C. (2020). Implementasi pendidikan politik pada partai politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, *10*(1), 70. https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/939

Indah Pratiwi, Rahayu, S., & Triyanto, T. (2020). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. *Jurnal PPKn: Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8*(2), 130. https://doi.org/10.2019/jppkn.v8i2.79

Indra Permana, T. C. (2016). Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *5*(1), 35. https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.35-52

Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi: The implementation of political party function and the impact on the consolidation of democracy. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *21*(2), 65. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/26013

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Media. (2024). *Pemilu 2024, Guru Besar UMS Sebut Pemilih Muda Cenderung Kritis dan Apatis*. News.Ums.Ac.Id. https://news.ums.ac.id/id/02/2024/pemilu-2024-guru-besar-ums-sebut-pemilih-muda-cenderung-kritis-dan-apatis/

Miriam, B. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Umum.

Muhdi, H. (2014). *Studi Ilmu Politik*. UIN Sunan Ampel Press.

Muhdi, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *4*(2), 135. https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145

Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Analisis Peran Komunitas Gubuk Inspirasi Dalam Membantu Mengembangkan Kualitas Pendidikan Dan Skill Pemuda Di Desa Sumberbrantas Kota Batu. *IDENTIK: Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, *2*(4), 103–108. https://sihojurnal.com/index.php/identik/article/view/667

Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *3*(6), 515. https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/2867

Pasaribu, P. (2017). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, *5*(1), 51. https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1125

Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *Bookchapter Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, *3*(1), 1–29. https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.48

Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *3*(3), 427–442. https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138

Riyanti, R., Luthfi, A., & Rohana, D. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis : Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 26–31. https://doi.org/10.70437/themis.v1i1.330

Sahya, A. (2023). *Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia.

Surbakti, R. (2018). *Memahami Ilmu Politik* (8th ed.). Grafindo Persada.

Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *Sasi*, *27*(4), 481. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563

Yusriati, Y., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa*, *14*(3), 500–507. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i3.831

Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, *5*(1), 69–87. https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550